



J-HES

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Volume 04 | Nomor 02 | Desember 2020
p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970

Keterbukaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan D.I Yogyakarta sebagai Entitas Grass Root Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Era New Normal

Mila Alim Bachri

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | milaalim46@gmail.com

Abstrak

Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta dianggap sebagai entitas grass root yang memiliki kewajiban untuk turut memberi stimulus pada masa pandemi dan menggerakkan kesejahteraan anggotanya di masa pandemi Covid-19. Objek penelitian akan menspesifikan pada Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta yang memiliki keharusan untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan keuangan dan ekonomi di organisasi nirlaba dengan membuat laporan keuangan guna meningkatkan kredibilitas dan harus dimaksimalkan perannya. Penelitian akan memiliki tujuan mengetahui penerapan sistem pengendalian internal pada siklus penerimaan kas dan pengeluaran kas dan mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan yang telah terimplementasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan faktadan juga jurnal sebagai literatur dan melakukan observasi serta analisis pada unit Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta dan dilakukan kajian secara kualitatif. Hasil penelitian mengukur 5 aspek penerapan pengendalian internal pada siklus penerimaan dan pengeluaran kas menurut COSO di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta, yaitu 1) lingkungan pengendalian, 2) penilaian resiko, 3) aktivitas pengendalian, 4) informasi dan komunikasi dan 5) pemantauan. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pada siklus penerimaan kas dan pengeluaran kas Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta telah berjalan dengan baik, senada dengan teridentifikasi beberapa kelebihan dan kelemahan. Poin kelemahan seperti pengelolaan yang menggunakan aplikasi dasar dapat berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut.

Kata Kunci: kas, laporan keuangan masjid, pengendalian internal, sistem penerimaan kas, sistem pengeluaran kas.

Abstract

Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta is considered a grass-root entity that has an obligation to provide stimulus during the pandemic and move the welfare of its members during the Covid-19 pandemic. financial reports in order to increase credibility and its role must be maximized. The research will have the aim of knowing the application of the internal control system in the cash receipt and cash disbursement cycle and identifying the weaknesses and strengths that have been implemented. This study used a descriptive research method using a factual approach and also journals as literature and conducting observations and analysis at the Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta and conducted a qualitative study. The results of the study measured 5 aspects of the application of internal control in the cycle of cash receipts and disbursements according to COSO at the Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta, namely 1) control environment, 2) risk assessment, 3) control activities, 4) information and communication and 5) monitoring. . From these results it is concluded that the implementation of the internal control system in the cash receipt and cash disbursement cycle of the Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta Mosque has been going well, in line with the identified strengths and weaknesses. Weakness points such as managing using basic applications can potentially be developed further.

Keywords: *Saving, Mosque Financial Report, Internal Control, Cash Receipt System, Cash Withdrawal System.*

PENDAHULUAN

Pandemi Covid 19 memunculkan rangkaian dampak terhadap sektor ekonomi secara global, tidak terkecuali lingkungan di sekitar penulis. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu upaya yang muncul sebagai strategi yang dapat meminimalisir keterpurukan kondisi ekonomi khususnya dalam wilayah yang dapat dijangkau oleh penulis. Peran strategi ekonomi dalam kelompok masyarakat sendiri dibutuhkan dalam menstabilkan ekonomi anggotanya ataupun masyarakat di sekitar lingkungan semasa pandemi Covid-19 dan menghadapi penataan kembali (restrukturisasi) sektor keuangan di era new normal. Hanya saja strategi-strategi tersebut harus efisien dan transparan untuk menghindari kecurangan dari pengelolaan penerimaan dan

pengeluaran kas. Hal tersebut tentu saja akan mengarah pada bagaimana suatu organisasi mampu melaporkan siklus penerimaan dan pengeluaran kasnya.

Berbicara mengenai siklus penerimaan dan pengeluaran kas, maka secara organisasi akan mengarah pada pengendalian internal dalam pelaporan keuangan. Sebagai bagian dari pelaporan keuangan, maka sesuai dengan PSAK No.45 2008 laporan keuangan dapat memanfaatkan ilmu akuntansi yang mana dapat dimanfaatkan untuk membantu mengambil keputusan (Made Aristia Prayudi, 2015). Hal tersebut dapat diimplementasikan pada organisasi besar hingga organisasi yang berkaitan dengan keuangan syariah dan ekonomi di organisasi nirlaba berbasis ekonomi pesantren, seperti Baitul Maal

Hidayatullah di Yogyakarta (Andarsari, 2016). Penulis memilih objek di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta, sebab dalam masa pandemi sering kali penguatan ekonomi berbasis keagamaan atau ekonomi pesantren jarang dipahami sebagai solusi restrukturisasi sektor ekonomi. Penulis akan melakukan analisis bagaimana peran lembaga dengan entitas keagamaan dapat berusaha untuk menyampaikan informasi guna tetap menjaga kestabilan ekonomi anggotanya serta kredibilitas organisasi, nantinya kredibilitas inilah yang bisa memberikan suatu strategi penguatan dalam masa pandemi (Wibowo, 2018).

Masjid dianggap sebagai entitas *grass root*, di mana dapat langsung sampai menyentuh seluruh lapisan masyarakat, oleh karena itu harus dimaksimalkan perannya (Astarani, 2019). Dilakukannya pengelolaan keuangan masjid yang baik oleh para pengurus merupakan salah satu faktor utama yang digunakan untuk menjaga keberlangsungan hidup serta kemakmuran suatu masjid. Hal ini disebabkan karena masjid membutuhkan adanya dana yang tidak sedikit setiap bulannya untuk mendukung kegiatan ibadah, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengembangan masjid.

Beberapa kasus yang dapat diamati dari penelitian terdahulu dan kondisi di lapangan sebelum pandemi Covid-19 terdapat beberapa masjid yang memiliki Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta dengan dana yang berlebih

namun tumbuh tanpa kejelasan kegiatan dan pelaporan keuangannya, sementara di sisi lain terdapat masjid yang progresif kegiatannya, namun kekurangan dana. Oleh karena itu, pengendalian internal untuk siklus penerimaan dan pengeluaran kas pada entitas keagamaan membutuhkan suatu sinergisitas agar tercapainya optimalisasi dari potensi keuangan masjid-masjid yang ada sebagai penguatan ekonomi pesantren di masa pandemi. Selain itu tentang pengendalian Internal untuk siklus penerimaan dan pengeluaran kas pada entitas keagamaan, terutama untuk masjid masih jarang dijadikan perhatian khusus dalam penulisan kajian ilmiah.

Sehingga penelitian akan memiliki tujuan mengetahui penerapan sistem pengendalian internal pada siklus penerimaan kas dan pengeluaran kas Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta dan mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan sistem pengendalian internal pada siklus penerimaan kas dan pengeluaran kas yang diimplementasikan pada kas Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta.

Tinjauan Pustaka

Pengendalian internal sebagai suatu rencana organisasi, seluruh metode yang tersinkronisasi dan pengskalaan yang diterapkan pada perusahaan untuk menjaga aktiva, mengandalkan dan mengakurasi data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional dan memacu kepatuhan terhadap peraturan manajerial yang telah ditempatkan (Ompusunggu, 2020). COSO

menyatakan bahwa pengendalian internal adalah suatu prosedur karena pengendalian internal menerobos aktivitas operasional organisasi dan juga menjadi salah satu bagian integral dari manajemen dasar. Jaminan secara wajar diberikan oleh pengendalian internal, karena kemungkinan adanya kolusi, kesalahan manusia, serta ketidakinginan manajemen atas pengendalian dapat menjadikan proses atau prosedur ini menjadi kurang baik (COSO, 2013).

Menurut COSO komponen-komponen pengendalian internal dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. COSO Internal Control: Integrated Framework

Di mana dijelaskan bahwa komponen pengendalian internal yang dapat dijelaskan meliputi:

- a) Lingkungan pengendalian, di mana merupakan salah satu hal yang mempengaruhi cara organisasi menetapkan strategi dan tujuannya, membuat struktur aktivitas bisnis, serta mengidentifikasi, menilai serta merespon resiko.
- b) Penilaian resiko, yang mana merupakan kegiatan untuk melakukan pengidentifikasian, analisis, dan pengelolaan resiko yang dapat mempengaruhi tujuan organisasi. Organisasi harus bisa mengetahui dan menghindari resiko yang mungkin terjadi, terutama pada saat penerimaan dan pengeluaran kas tentunya mempunyai banyak resiko (Sukadwilinda, 2013). Manajemen juga harus dapat mengidentifikasi dan menilai perubahan-perubahan secara signifikan yang dapat berdampak pada sistem pengendalian internal.
- c) Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan, prosedur, dan aturan yang dapat memberikan jaminan yang mencukupi dengan tujuan mengendalikan apa yang telah dicapai dan resiko kedepannya. Hal ini juga memberikan suatu kepercayaan bahwa kegiatan yang dibutuhkan dapat terlaksana sehingga dapat mengurangi risiko dalam mencapai tujuan perusahaan.
- d) Organisasi membutuhkan informasi dan komunikasi yang sangat dibutuhkan dalam organisasi untuk menunjang aktivitasnya, melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal serta mendukung pencapaian tujuannya. Informasi sendiri harus dapat diidentifikasi, diproses dan dikomunikasikan ke pihak yang tepat sehingga setiap orang dalam organisasi dapat melaksanakan

tanggung jawab mereka dengan baik (Tawaqal, 2016). Sedangkan komunikasi merupakan proses pemahaman peran individu dan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pengendalian internal terhadap laporan keuangan.

- e) Pemantauan merupakan suatu proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian internal selama waktu kerja mereka (Steinbart, 2015). Dalam pemantauan ini meliputi penentuan desain dan pengendalian operasi yang tepat waktu dan juga pengambilan tindakan perbaikan (Mulyadi, 2008).

Kas merupakan aset paling aktif dalam komponen aktiva pada semua jenis organisasi, termasuk yang terjadi di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta. Kas memiliki sifat yang *liquid* sehingga memberikan kemudahan dalam penggunaannya, namun juga dapat menjadi celah kecurangan (Halim, 2010). Selain itu, kas memiliki sifat yang mudah untuk dipindah tangankan sehingga jika tidak akan menjadi bias dibuktikan kepemilikannya dan kas berpotensi disalahgunakan (Rahmawati, 2016). Unsur-unsur dari pengendalian internal yang baik dalam pengelolaan kas adalah: 1) Organisasi, 2) Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, 3) Praktik yang sehat dan 4) Karyawan yang berpotensi (Hapsari, 2016).

Pengeluaran kas adalah prosedur yang dirancang agar setiap pengeluaran dipastikan telah disetujui dan merupakan pengeluaran yang

bermanfaat bagi tujuan Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta. Sistem pengeluaran kas dapat membantu perusahaan agar dapat dengan mudah mengatur hal hal mengenai rincian pengeluaran kas yang sudah dikeluarkan (Baridwan, 1993).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan faktadan juga jurnal sebagai literatur dan melakukan observasi serta analisis pada unit Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta dan dilakukan kajian secara kualitatif. Penelitian Kualitatif secara khusus penting dalam ilmu perilaku dimana tujuannya adalah untuk menemukan mendasari motif perilaku manusia tersebut (Jusup, 2014). Melalui penelitian tersebut kita dapat menganalisis berbagai faktor yang memotivasi orang untuk berperilaku dalam cara tertentu atau yang membuat orang-orang seperti atau tidak suka hal tertentu (Mardi, 2011). Ini dapat dinyatakan, bagaimanapun, bahwa untuk menerapkan penelitian kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta

Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta merupakan sebuah lembaga keuangan berbasis keagamaan islam yang mulai tumbuh secara pesat di beberapa lingkungan masyarakat dan mulai populer di tahun 1987an. Baitul

Maal Hidayatullah Yogyakarta memiliki tugas utama yaitu sebagai pelaksana kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pengembangan kepribadian anggotanya dalam bidang keagamaan Islam. Tugas tersebut diimplementasikan oleh Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta melalui berbagai program dan kegiatan yang dijalankan selama satu tahun kepengurusan.

Sebagai salah satu bentuk upaya untuk memberikan strategi ekonomi dan penguatan ekonomi di era *new normal*, penyelarasan langkah dan menjalin persaudaraan, Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta dituntut adaptif dengan sinergitas bersama beberapa organisasi kemitraan dan pembiayaan yang bersifat keagamaan diantaranya adalah Forum lembaga pembiayaan yang tersebar di beberapa daerah, lingkungan hingga tingkat kelurahan serta Forum Kerjasama Kerohanian antar agama pun yang mana berskala regional hingga nasional. Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta bercita-cita menjadi rumah yang dapat memberikan pelayanan terbaik dan menghidupkan syiar sebagai solusi untuk semua aspek keumatan bagi anggotanya. Peran Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta sendiri semakin disorot sebagai salah satu solusi keuangan di masa pandemi Covid-19 oleh wilayah sekitar.

Anggota Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta merupakan semua insan muslim di lingkungan berdiri dan sekitarnya yang terdiri dari pengurus dan masyarakat. Pengurus Baitul Maal

Hidayatullah Yogyakarta merupakan anggota yang terdaftar secara resmi melalui proses seleksi. Masa Bakti kepengurusan Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta umumnya adalah satu tahun periode kepengurusan. Sebagai lembaga keagamaan, Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta menjadi penggerak syi'ar dakwah Islam melalui serangkaian kegiatan yang dilaksanakan. Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta adalah organisasi formal dan legal yang memiliki dua fungsi, yaitu:

- a. sebagai lembaga keagamaan Islam yang menaungi kegiatan semua muslim di lingkungan berdirinya;
- b. sebagai lembaga keuangan yang berupaya untuk dapat menaungi semua masyarakat muslim di sekitar lingkungan berdirinya.

Visi umum dari pengadaaan Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta adalah menjadi lembaga keagamaan yang dekat kepada semua lapisan masyarakat, bersahabat untuk semua elemen suku dan agama, serta senantiasa bermanfaat untuk muslim maupun masyarakat umum. Misi umum dari penyelenggaraan Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan peran Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta dalam proses pembentukan karakter anggota yang sholeh, cerdas serta berwawasan global.
- b. Menjadi sebuah organisasi yang selalu merangkul semua elemen

masyarakat dan siap untuk bekerja sama dalam kebaikan.

- c. Mencetak anggota dan pengurus serta kader yang berperilaku baik, tangguh, serta berani.
- d. Menjadi organisasi yang berfokus pada pelayanan umat.

Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta memiliki struktur umum yang terdiri atas:

- a. Badan Pengurus Harian yang selanjutnya disingkat BPH
- b. Bidang Keuangan
- c. Badan Amal

Badan Pengurus Harian (BPH) merupakan badan yang bertugas untuk melakukan koordinasi, kontrol, pengembangan sistem manajemen administrasi dan keuangan serta komunikasi dalam membangun hubungan internal dan eksternal Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta. Badan Pengurus Harian beranggotakan ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara.

Sedangkan untuk Bidang Keuangan sendiri, tugas pokok dan fungsinya yaitu:

- a. Kepala Bidang Keuangan selaku Bendahara Umum Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta, berperan untuk menyusun kebijakan dan sistem keuangan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran, menguji dan mengotorisasi SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran, bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta terkait pengelolaan keuangan, bertanggung jawab atas

penyusunan laporan keuangan, menjalani tugas lainnya terkait keuangan.

- b. Wakil Kepala Bidang Keuangan selaku Kuasa Bendahara Umum, bertugas untuk menerima, menyimpan, mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan uang penerimaan Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta (fungsi penyimpanan), melakukan pencatatan atas penerimaan kas, menerbitkan BKK dan melakukan pencairan dana, dan menjalani tugas lain yang menjadi tanggungjawabnya.
- c. Verifikator bertugas untuk mengecek kewajaran Surat Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran dan menjalani tugas lain yang menjadi tanggungjawabnya.
- d. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas menerima, menyimpan, mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja bidang, menatausahakan dokumen terkait penggunaan dana, menyusun dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana (misal SPJ), melakukan pencatatan atas pengeluaran kas berdasarkan SPJ, menghitung sisa pagu anggaran setiap bidang, dan menjalani tugas lain yang menjadi tanggungjawabnya.
- e. Terdapat enam Bendahara Pengeluaran, tiap-tiap Bendahara

Pengeluaran akan mengampu bidang-bidang sebagai Sekretariat Jenderal dan Keuangan, Rumah Tangga, Pendidikan dan Informasi Media, Syiar, Seni Budaya dan Pemuda Olahraga. Bendahara Pengeluaran untuk bidang Pengembangan Sumber Daya Insani dan Keputrian adalah Bendahara Internal Bidang. Posisi Bendahara Pengeluaran akan disesuaikan secara langsung sesuai kebutuhan.

- f. Kepala Bidang selaku Pengguna Anggaran, bertanggungjawab untuk menyusun dokumen rencana anggaran, menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu, melaporkan penerimaan bidang, menerbitkan dan menandatangani SPM, dan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban dan Dokumen pertanggungjawaban lainnya terkait penggunaan dana kepada Bendahara Umum.
- g. Bendahara Pengeluaran Pembantu, bertugas menatausahakan dokumen terkait penggunaan dana dan menjalani tugas lain yang menjadi tanggungjawabnya.
- h. Bendahara Proyek adalah Bendahara dalam kegiatan proyek yang berbentuk kepanitiaan. Bendahara proyek menjalankan tugasnya dengan berpedoman kepada SPI Keuangan Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta. Bendahara proyek wajib menyerahkan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan dan

uang sisa kegiatan kepada Bendahara Pengeluaran.

Proses Bisnis Penerimaan dan Pengeluaran Kas Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta

Berdasarkan wawancara penulis dengan pengurus, berikut uraian proses penerimaan dan pengeluaran kas yang ada di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta

a. Penerimaan Kas

Sebelum adanya proses penerimaan kas, dilakukan terlebih dahulu proses penyusunan dan penetapan anggaran atau penganggaran. Penganggaran merupakan proses yang penting karena anggaran berfungsi untuk mendukung perencanaan kegiatan yang sudah disusun. Anggaran pada organisasi nirlaba merupakan gambaran dari rencana suatu kegiatan atau program organisasi dan sumber dana yang dibutuhkan. Oleh karena itu, organisasi nirlaba seperti masjid perlu memfokuskan diri pada kegiatan atau program yang dimiliki dan juga dalam mencari sumber pendanaan untuk membiayai programnya.

Prosedur penyusunan dan penetapan anggaran Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta, yaitu:

- 1) Rancangan APB di mana tiap-tiap bidang membuat program kerja disertai dengan rencana anggaran yang dituangkan kedalam RAB dan RKA
- 2) Rencana anggaran tiap-tiap bidang dihimpun dan dibahas

dalam pembicaraan pendahuluan antara BPH dan Ketua bidang.

- 3) Penyusunan Rancangan APB berdasarkan rencana anggaran yang telah disetujui oleh Ketua Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta. Rancangan APB harus berdasarkan pedoman penyusunan Rancangan APB
- 4) RKA dan RAPB Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta dibahas bersama dengan seluruh pengurus.
- 5) RAPB diajukan kepada lembaga pembiayaan.
- 6) Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta melakukan pembahasan Rancangan APB.
- 7) Kemudian Rancangan APB ditetapkan menjadi APB oleh lembaga pembiayaan syariah.
- 8) Bendahara Umum akan memberitahukan kepada tiap-tiap bidang hasil penetapan anggaran dan memutuskan besaran pagu anggaran untuk setiap bidang.
- 9) Dalam jangka waktu maksimal 7 hari setelah keputusan anggaran itu diumumkan, setiap kepala bidang wajib menyesuaikan RAB dan RKA yang telah dibuat, kemudian menyerahkannya kepada Bendahara Umum untuk mendapatkan pengesahan.
- 10) Periode anggaran mengikuti ketentuan yang berlaku

11) Perubahan APB diatur lebih lanjut melalui Kebijakan Bidang Keuangan.

Penerimaan kas di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta dimulai ketika kas diterima oleh bendahara bidang maupun oleh Kuasa Bendahara Umum atau Bendahara Umum. Kas diterima di rekening kas umum Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta, lalu dicatat dengan menggunakan Bukti Kas Masuk (BKM) sebagai dasar penjurnalan. Dokumen yang merupakan bukti penerimaan kas seperti laporan Infaq, BKM, kuitansi, serta dokumen penerimaan kas lainnya, dipakai sebagai dasar untuk melakukan pencatatan penerimaan kas. Tiap-tiap bidang dan oleh Kuasa Bendahara Umum selanjutnya melakukan pencatatan penerimaan kas. Pencatatan ataupun penjurnalan akan dilakukan saat telah dibuatnya dokumen bukti penerimaan kas dan tanggal dicatat sesuai tanggal dilakukannya transaksi penerimaan kas.

b. Pengeluaran Kas

Sistem pengeluaran kas merupakan suatu sistem yang dirancang agar kas yang dikeluarkan oleh lembaga dapat dipertanggung jawabkan. Sistem pengeluaran kas yang baik diharapkan akan memberikan efisiensi dan efektivitas

penggunaan dan sumber daya keuangan. Dalam hal ini, Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta sebagai salah satu lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri diharapkan dapat menerapkan sistem pengendalian yang ideal, terutama pengeluaran kas.

Pengeluaran kas dimulai ketika adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Ketua Bidang. Selanjutnya SPP diverifikasi oleh verifikator kemudian diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM). SPM dapat diterima hanya jika dibantu dengan dokumen yang lengkap didukung dengan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana sebelumnya berupa Daftar Nominatif, Surat Pertanggungjawaban, dan dokumen lain yang diperlukan. Dokumen bukti pengeluaran kas berupa kuitansi, nota, faktur, cek, bukti transfer, dan dokumen pengeluaran kas lainnya yang dapat dipakai sebagai dasar untuk pencatatan pengeluaran kas.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk kemudian diotorisasi oleh Bendahara Umum. Kas kemudian dikeluarkan, baik melalui mutasi rekening maupun secara kas. Semua barang dan jasa yang didapat dari setiap bidang ditulis dalam daftar nominatif. Satu daftar

nominatif yang dibuat hanya dapat digunakan untuk satu jenis kegiatan dan pembelanjaan, yang di dalamnya perlu dilampirkan bukti bukti pengeluaran kas yang telah digunakan. Pertanggungjawaban belanja tiap-tiap bidang disampaikan dalam bentuk SPJ yang disusun oleh Bendahara Pengeluaran. SPJ wajib dilampiri daftar nominatif dan bukti-bukti pengeluaran kas. Penjurnalan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran.

Tinjauan Lima Aspek Pengendalian Internal Pada Siklus Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta adalah Lembaga keuangan berbasis Keagamaan yang memfasilitasi kegiatan keagamaan dan dakwah Islami bagi masyarakat yang mana dituntut untuk memberikan strategi ekonomi dan penguatan ekonomi di era *new normal*. Ruang lingkup organisasi Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta sangat luas, oleh karena itu diperlukan suatu kontrol internal terkait keuangan yang dirancang untuk mengelola sumber daya keuangan. Maka, dibuatlah Sistem Pengendalian Internal yang diharapkan akan memperbaiki pengelolaan keuangan dan menjamin kewajaran laporan keuangan Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta. Sistem yang dibuat tetap berpedoman kepada AD/ART dan Standar Akuntansi, yaitu :

- a. Standar Akuntansi, merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan

menyajikan laporan keuangan setiap elemen.

- b. Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta berwenang mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri.
- c. Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta berhak menggunakan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan.
- d. Hal yang tidak diatur dalam SPI ini, maka mengikuti ketentuan yang diatur oleh SA.

Tinjauan atas penerapan pengendalian internal yang memungkinkan dilakukan sebagai strategi ekonomi di era *new normal* pada siklus penerimaan dan pengeluaran kas menurut COSO di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta akan diidentifikasi melalui 5 aspek, yaitu

- a. lingkungan pengendalian,
- b. penilaian resiko,
- c. aktivitas pengendalian,
- d. informasi dan komunikasi dan
- e. pemantauan.

Hal tersebut dirinci sebagai berikut:

1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan komponen dasar terpenting bagi komponen pengendalian internal lainnya. Bagaimana sikap dan tindakan pengurus menjadi cerminan sebuah organisasi. Lingkungan pengendalian merupakan pijakan untuk semua bagian dalam pengendalian internal untuk

membentuk karakter disiplin dan terstruktur (Sabeni, 2010). Lingkungan pengendalian menetapkan corak organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orang di sekitarnya, meliputi:

- a) Komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika

Nilai-nilai kejujuran dan kedisiplinan sudah diterapkan pengurus Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta dengan baik sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Untuk mengatur sikap dan perilaku para pengurus, telah dibuat suatu kode etik yang jelas dan eksplisit. Pemberian reward pun diberikan bagi bidang dengan rata-rata yang memberikan pelayanan terbaik sesama anggota dan hukuman juga diberikan bagi yang melanggar kode etik. Para pengurus juga saling mengingatkan dan memantau jika ada anggota yang tidak jujur atau melanggar kode etik.

- b) Filosofi pihak manajemen dan gaya operasi

Sebuah organisasi pasti mempunyai sebuah filosofi atau kepercayaan dan sikap yang dianut bersama, tentang resiko-resiko yang mempengaruhi kebijakan, prosedur, komunikasi lisan dan tulisan, serta keputusan (Singleton, 2010).

Terkait filosofi pihak manajemen, para pengurus dan anggota Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta mendasarkan

kepercayaan, sikap, keputusan serta pengambilan kebijakan pada Al-Qur'an, hadis dan Kode Etik Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta. Selain itu, terkait gaya operasi, garis wewenang dan tanggung jawab para pengurus ditetapkan dengan ketat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa pengurus memiliki perhatian yang cukup besar pada pengendalian internal dan manajemen resiko untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi.

c) Komitmen terhadap kompetensi

Perekrutan pengurus pada Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta dilaksanakan secara jujur, adil dan terbuka. Perekrutan pengurus terbuka bagi siapa saja tanpa adanya diskriminasi. Penempatan posisi jabatan pengurus masjid dilakukan sesuai dengan minat dan keahlian dari para anggota.

Pelatihan secara umum pun diadakan bagi para pengurus seperti kegiatan orientasi kader (sejenis masa orientasi pengurus baru Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta) dan ada juga yang berupa pelatihan tertentu, tergantung bidang tertentu yang dipandang perlu mengadakan, seperti Sosialisasi Sistem Pengendalian Internal untuk anggota pengurus bidang Keuangan. Pelatihan ini diadakan agar mereka lebih mumpuni dalam menjalankan tugasnya sehingga seiring

berjalannya waktu mereka akan terbiasa untuk melakukan pekerjaan yang sudah diamanahkan kepada mereka.

d) Dewan komisaris dan komite audit

Pada Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta, tugas sebagai dewan komisaris dan komite audit dilakukan oleh pihak yang melakukan pemantauan internal dan eksternal. Pemantauan internal dilakukan oleh Ketua, Inspektorat Jenderal dan Keuangan. Sedangkan pemantauan eksternal dilakukan oleh Lembaga Dakwah dari Organisasi Masyarakat serta Badan Audit Internal sebagai badan audit. Proses pemantauan dilakukan secara informal.

e) Struktur Organisasi

Struktur organisasi di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta sudah dijelaskan secara rinci beserta masing-masing tugasnya. Adanya struktur yang jelas memberikan sebuah kerangka bagi operasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan organisasi. Struktur yang jelas menunjukkan batas wewenang setiap pengurus melalui suatu garis komando dan menetapkan garis otoritas serta tanggung jawab (Soemarso, 2009).

f) Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab

Penetapan wewenang serta tanggung jawab di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta sudah

jelas sebagaimana yang dijelaskan dalam prosedur penerimaan dan pengeluaran kas. Setiap tahap sudah terbagi dan memiliki tanggung jawab kepada setiap bagian-bagiannya. Dalam penjelasan tersebut sudah cukup jelas untuk pembagian tugas dan fungsinya. Namun, tidak ada keberadaan bendahara penerimaan dapat menjadi suatu keganjilan. Meskipun tugas penerimaan kas telah dilakukan oleh Wakil Kepala Bidang Keuangan, diharapkan kedepannya ada Bendahara Penerimaan di dalam kepengurusan Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta.

g) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

Pada Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta, kebijakan-kebijakan yang dibuat dan praktik-pratik yang mengatur kondisi kerja dibuat seadil mungkin untuk menaungi semua kepentingan pengurus dan anggota. Semua kebijakan dibuat serinci mungkin untuk setiap jabatan agar tidak ada diskriminasi yang terjadi. Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta merupakan organisasi nonprofit dan para pengurus yang terpilih bekerja tanpa adanya pamrih atau imbalan sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan selalu berlandaskan pada semangat pengabdian serta kejujuran. Adanya pengurus yang jujur menciptakan suatu lingkungan pengendalian yang baik.

2) Penilaian Resiko

Salah satu pelaksanaan penerapan penilaian risiko pada Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta adalah pemberian deadline yang diberikan kepada panitia pelaksana untuk menyerahkan Lembar Pertanggung Jawaban (LPJ) paling lambat dua minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan agar kegiatan yang dilakukan dapat segera dievaluasi dan tidak berbenturan dengan pelaksanaan kegiatan yang lain. Laporan Pertanggungjawaban minimal berisi keterangan waktu, tempat, agenda/materi, peserta dan tanggal, dan rincian anggaran yang digunakan.

Setiap tahun pengurus melakukan perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran untuk organisasi nonprofit mempunyai peran yang berbeda dengan perencanaan anggaran pada perusahaan atau sektor bisnis. Pada perusahaan, anggaran ditetapkan dengan menitikberatkan pada target penerimaan. Produksi dan pemasaran dilakukan semaksimal mungkin untuk dapat mencapai target penerimaan ini. Pada organisasi nonprofit, anggaran merupakan suatu terjemahan dari rencana kegiatan atau program organisasi dan sumber dana yang dibutuhkan. Untuk itulah perencanaan anggaran berperan seperti peta bagi pelaksana

kegiatan. Adanya perencanaan anggaran di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta memberikan kemudahan dan kejelasan bagi para pengurus untuk mencari sumber dana untuk membiayai program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Pengotorisasian dan persetujuan pihak yang berwenang atas transaksi yang dilakukan merupakan sebuah kontrol sehingga bisa meminimalisir adanya dana yang tidak valid penggunaannya. Tanpa otorisasi, akan banyak manipulasi atas transaksi-transaksi yang terjadi. Pada umumnya persetujuan dalam hal ini sudah di drop kepada masing-masing bidang, dimana dalam Surat Perintah Membayar (SPM UP/GUP/GU/LS) ditandatangani oleh Bendahara Bidang/Bendahara Event/Kepala Bidang).

Sedangkan penyimpanan kas fisik di brankas dan pemantauan secara berkala terhadap rekening kas di bank dilakukan agar kas tetap aman dan terpantau. Akses brankas hanya diberikan kepada pihak yang berwenang dan setiap pengambilan uang harus dilakukan minimal oleh dua pihak. Pemantauan berkala terhadap kas dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan kas.

3) Aktifitas Pengendalian

Pada Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta, pengendalian umum berupa audit teknologi informasi

dijalankan oleh dewan pemantauan internal yaitu oleh Ketua dan Inspektorat Jenderal dan Keuangan. Sedangkan pemantauan eksternal dilakukan oleh Badan Legislatif Masyarakat serta Badan Audit Kemasyarakatan sebagai badan audit. Sedangkan pengendalian aplikasi dilakukan dengan pemasangan pengolahan data sistem komputer dan antivirus yang selalu update untuk meminimalisir serta mencegah terjadinya kerusakan data elektronik.

Untuk pengendalian fisik sendiri dilakukan upaya

- a) otorisasi transaksi dan aktivitas yang tepat,
- b) spesialisasi tanggung jawab,
- c) format dan penggunaan dokumen pekerjaan,
- d) pengamanan harta kekayaan perusahaan, dan
- e) independensi pemeriksaan

4) Informasi dan Komunikasi

Melihat perkembangan zaman yang sudah maju seperti sekarang ini, Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta telah melakukan pencatatan kas masuk dan kas keluar menggunakan teknologi Ms. Excel dan mencocokkan dengan pencatatan manual apakah terjadi kesalahan dalam pencatatannya atau tidak. Pencocokan tersebut harus balance atau sama. Jika terjadi kesalahan pencatatan maka, bagian keuangan harus segera memperbaiki pada saat itu juga.

5) Pemantauan

Pada Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta dibentuk pengawas internal, yaitu dibentuknya Inspektorat Jenderal (Itjen) Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta adalah agar dapat dilakukan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Selalu dilakukannya pemantauan rutin oleh pihak yang berwenang berupa pemantauan internal oleh Ketua dan Inspektorat Jenderal dan pemantauan eksternal oleh BLM serta BAK yang memiliki fungsi untuk dapat menentukan apakah pengendalian internal sudah bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan, dan apakah diperlukan adanya perubahan perubahan akibat perubahan situasi atau keadaan yang berubah. Pengurus masjid juga mengadakan evaluasi setiap bulannya untuk mengontrol serta melihat kinerja setiap pengurus dan menanyakan kendala apa saja yang ada serta program apa yang sudah terealisasi dan yang belum. Jika terdapat kendala maka akan dicari solusi bersama-sama dan segera untuk dilakukannya perbaikan agar kendala tersebut terselesaikan.

Generalisasi 10 Komponen Sistem Pengendalian Internal

Hasil penelitian menyajikan suatu kajian yang tergeneralisasi menjadi 10 (sepuluh) komponen sistem pengendalian internal menurut COSO dan menelaah kesesuaian antara fakta dengan teori mengenai situasi pandemi dari peran yang telah dijalankan oleh Baitul Maal sebagai salah satu lembaga keuangan berbasis agama, berupa:

- a. Adanya suatu strategi budaya yang dibentuk dalam kepengurusan Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta sudah menekankan pada integritas dan nilai etika. Nilai-nilai kejujuran dan kedisiplinan sudah diterapkan pengurus dengan baik.
- b. Garis wewenang dan tanggung jawab para pengurus ditetapkan dengan ketat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa pengurus memiliki perhatian yang cukup besar pada pengendalian internal dan manajemen resiko untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi.
- c. Perekrutan pengurus pada Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta dilaksanakan secara jujur, adil dan terbuka. Perekrutan pengurus terbuka bagi siapa saja tanpa adanya diskriminasi. Ini merupakan contoh yang baik dari suatu lembaga keagamaan di dalam masyarakat.
- d. Telah dilakukan pengotorisian dan persetujuan transaksi oleh pihak

- yang berwenang sehingga dapat meminimalisir adanya dana yang tidak valid penggunaannya. Setiap akan melakukan kegiatan, ketua/ koordinator pelaksana yang berasal dari masing-masing bidang mengajukan ijin kepada Ketua Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta secara lisan maupun tertulis sehingga Ketua dapat mengetahui kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan dan seberapa banyak pengeluarannya.
- e. Struktur organisasi Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta sudah cukup memadai dan pembagian tugas serta fungsi masing-masing jabatan sudah cukup jelas. Hanya saja ada satu kelemahan dan kekurangan yaitu tidak adanya Bendahara Penerimaan. Tugas sebagai Bendahara Penerimaan dilakukan oleh Wakil Kepala Bidang Keuangan. Seharusnya Wakil Kepala memiliki tugas dan fungsi untuk membantu Ketua dalam menjalankan tugasnya, bukan menjadi Bendahara Penerimaan.
- f. Dokumen-dokumen untuk pencatatan telah dibuat sedemikian rupa dan disesuaikan dengan setiap jenis transaksi yang terjadi sehingga memudahkan dalam pencatatan setiap transaksi dan pembukuan.
- g. Penyimpanan uang sudah menggunakan rekening tersendiri sehingga lebih mudah pengelolaannya dan tidak terjadi kecurangan.
- h. Sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta tergolong baik. Pencatatan telah dilakukan menggunakan aplikasi Ms. Excel, sehingga memudahkan dalam pengecekan dan pengauditan oleh pihak yang berwenang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pada Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta sudah cukup memadai. Adanya dewan pengawas internal dan eksternal yang rutin melakukan pengecekan terhadap laporan keuangan dan kinerja pengurus Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta menunjukkan bahwa pengendalian internal telah dijalankan dengan semestinya.
- i. Adanya sumber daya manusia yang kompeten karena berasal dari masyarakat Yogyakarta yang memiliki pengetahuan tentang akuntansi, dapat memudahkan proses pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas sesuai standar akuntansi yang berlaku.
- j. Adanya pencatatan dengan menggunakan akuntansi double entry mengindikasikan penggunaan sistem pencatatan akuntansi yang sesuai standar, sehingga memudahkan dalam pengecekan laporan keuangan baik oleh pengurus sendiri atau dewan pengawas.

k. Kegiatan pemantauan pengendalian internal dilaksanakan dengan cukup baik. Adanya pengawasan internal dan eksternal serta independensi pihak pengawas membuat fungsi pengawasan benar-benar dapat dilaksanakan secara maksimal.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan landasan teori mengenai sistem pengendalian internal menurut COSO dengan melakukan analisis atas komponen-komponen sistem pengendalian internal menurut COSO dan menelaah kesesuaian antara fakta dengan teori mengenai sistem pengendalian internal menurut COSO.

Dari hasil tinjauan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pada siklus penerimaan kas dan pengeluaran kas Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta telah berjalan dengan baik dengan teridentifikasi beberapa kelebihan berupa adanya 1) budaya yang dibentuk dalam kepengurusan, 2) garis wewenang dan tanggung jawab para pengurus ditetapkan dengan ketat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, 3) perekrutan pengurus pada Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta dilaksanakan secara jujur, adil dan terbuka, 4) telah dilakukan pengotorisasian dan persetujuan transaksi oleh pihak yang berwenang sehingga dapat meminimalisir adanya dana yang tidak valid penggunaannya, 5) struktur organisasi Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta sudah cukup memadai dan pembagian tugas serta fungsi masing-

masing jabatan sudah cukup jelas, 6) penyesuaian dokumen, 7) penyimpanan uang sudah menggunakan rekening tersendiri, 8) sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas terlaksana, 9) adanya sumber daya manusia yang kompeten, dan 10) menggunakan akuntansi *double entry*, serta kegiatan pemantauan pengendalian internal dilaksanakan dengan cukup baik.

Adapun hasil identifikasi kelemahan sistem pengendalian internal pada siklus penerimaan kas dan pengeluaran kas yang diimplementasikan pada Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta meliputi masih kecilnya organisasi sehingga masih terjadi penugasan secara ganda pada bagian tertentu, kelemahan berikutnya adalah pengelolaan masih menggunakan aplikasi dasar dan dapat berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut.

Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta telah menjalankan sistem pengendalian internal yang cukup memadai sesuai dengan kerangka pengendalian internal COSO. Lima komponen pengendalian menurut COSO telah dilaksanakan dengan baik, kecuali untuk satu hal terkait tugas bendahara. Di dalam kepengurusan Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta hanya terdapat Bendahara Pengeluaran. Tugas penerimaan kas dilakukan oleh Wakil Kepala Bidang Keuangan. Meskipun artinya penerimaan dan pengeluaran kas dilakukan oleh orang yang berbeda, namun di dalam

organisasi yang baik harusnya terdapat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Selain itu seorang Wakil Kepala seharusnya memiliki tugas dan fungsi untuk membantu Kepala Bidang menjalankan tugasnya, bukan menjadi Bendahara Penerimaan. Orang dapat mengira bahwa Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta tidak

memiliki pengurus yang bertugas melakukan penerimaan kas.

Adapun kemudian yang menjadi implikasinya adalah diperlukan penyesuaian kembali dan merekomendasikan menggunakan aplikasi yang lebih sebagai bentuk efisiensi dan transparansi dari pengelolaan organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andarsari, P. R. (2016). Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid). *Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri Vol 1 No 2*, 143-152.
- Astarani, J. (2019). Desain Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Keuangan Masjid Serta Desain Pola Kerjasama Ekonomi Antar Masjid Di Kota Pontianak. *Konferensi Akuntansi Khatulistiwa* (pp. 43-60). Pontianak: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungura.
- Baridwan. (1993). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: BPPK.
- COSO. (2013). *What is COSO: Background and Events Leading to Internal Control-Integrated Framework*. London: Treadway Commission.
- Halim, A. (2010). *Sistem Akuntansi Sektor Publik (First ed.)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hapsari, S. W. (2016). Evaluasi Sistem Akuntansi Penjualan Dan Penerimaan Kas Dalam Meningkatkan Pengendalian Intern Yang Efektif. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol. 30 No. 1.
- Jusup, A. (2014). *Auditing (Pengauditan Berbasis ISA)*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Made Aristia Prayudi, M. N. (2015). Penerapan Standar Akuntansi Nasional Pada Organisasi Nirlaba Bidang Sosial Kemanusiaan di Bali. *Jurnal Akuntansi & Investasi Vol 16 No 2*, 110-120.
- Mardi. (2011). *Sistem Informasi Akuntansi*. Bogor: Ghalia.
- Mulyadi. (2008). *Sistem Akuntansi, Edisi ke-3, Cetakan ke-4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ompusunggu, S. G. (2020). Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik Vol 11 No 1*.
- Rahmawati, M. S. (2016). *Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Untuk Meningkatkan Pengendalian Intern Perusahaan*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sabeni, G. (2010). *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan (Edisi Keempat ed.)*. Yogyakarta: BPFE.
- Singleton. (2010). *Fraud Auditing and Forensic Accounting Fourth Edition*. Wiley Corporate Financial and Accounting.
- Soemarso. (2009). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.

- Steinbart. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi: Accounting Information Systems 13th Edition*. Prentice Hall.
- Sukadwilinda, R. A. (2013). Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset) Vol 5 no 1*, 11-21.
- Tawaqal. (2016). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Atas Prosedur Pemberian Kredit, Pengeluaran Dan Penerimaan Kas. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 39 No. 2*.
- Wibowo, E. A. (2018). Persepsi Anggota Gereja Atas Pengendalian Internal. *Gema Teologika Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian Vol 3 No 1*.